Kebijakan Ekonomi Pro RAKYAT

A. Masalah Yang Kita Hadapi

Ekonomi Indonesia sudah memasuki kelompok menengah dengan pendapatan per kapita 3500 USD atau sekitar 15 juta per keluarga per bulan. Dengan jumlah penduduk yang besar maka Indonesia masuk dalam G 20 di posisi 16.

Ekonomi Indonesia merupakan inti dari ASEAN melipuiti sekitar 40 persen. Merupakan pasar yang besar dengan penduduk 250 juta, hampir setengah dari pasar ASEAN.

Ekonomi Indonesia masih terus tumbuh secara sinambung sejak Orde Baru sampai sekarang dengan pengecualian pada tahun 1998 da 1999. Berkah tersebut masih ditambah oleh sumber alam yang lengkap, dan iklim dua musim yang secara ekonomi murah, tidak memerlukan pemanas dan pendingin.

Dari prestasi tersebut masih menyisakan persoalan ekonomi yaitu ketidak merataa, meningkatnya ketimpangan antar strata, yaitu pendapatan ekonomi kelompok bawah dan atas, antar daerah baik Jawa - Luar Jawa, bagian Barat dan Timur, dan antar Etnik yang selama ini tabu dibicarakan. Di Barat, studi mengenai pendapatan, misalnya upah, biasa dianalisis antar etnik dan gender, secara cool, bertujuan untuk mencari solusi dan treatment kebijakan kepada yang kurang diuntungkan.

Masalah besar lain selain ketimpangan adalah masalah pengangguran yang masih besar, dan terutama yang lebih besar adalah angka setengah pengangguran. Setiap tahun lulusan SMP dan Sekolah menenhah atas yang tidak melanjutkan berdesakan di pasar kerja. Jutaan lulusan baru dannsisa penganggur tahun lalu dan setengah pengangguran yang kurang produktif menunggu terbukanya pekerjaan baru yang memberi harapan lebih baik.

Pengangguran adalah masalah yang sangat serius (dalam bahasa agama disebut kaum fakir) yang menjadi sasaran zakat dalam rukun Islam. Pengangguran lebih berbahaya daripada perbudakan, karena perbudakan masih memberi pekerjaan walaupun hak hak si pekerja mungkin sangat buruk, sedangkan pengangguran tidak memberi hak sama sekali kepada si angkatan kerja.

Masalah lain dalam kerangka ekonomi kerakyatan yaitu inflasi yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, sekitar 5 persen, akan tetapi dalam 5 tahun tetap menggerogoti seperempat daya beli lapisan pekerja informal dan buruh tani yang jumlahnya lebih besar dari pekerja di sektor formal yang diatur oleh upah minimum. Apabila inflasi bisa ditekan menjadi 2 persen tentulah lebih baik bagi para pekerja di sektor informal dan buruh tani yang tidak mempunyai lahan.

Masalah lain yang kita hadapi adalah suku bunga tinggi, di mana suku bunga pinjaman di bank komersial masih 12 persen, 20 persen di BPR, 40 persen di BMT (koperasi jasa keuangan), dan 200 persen di rentenir. Hal ini menghambat pertumbuhan usaha baru dan penciptaan lapangan kerja baru.

Kurs mata uang asing juga terus meningkat antar waktu yang disebabkan oleh defisit neraca pembayaran, impor yang besar ternyata adalah bahan bakar minyak (BBM) yang habis kita bakar karena sifat konsumtif di mana kita senang berkendaraan pribadi di samping juga buruknya kendaraan umum. Ekonomi negara mirip dengan ekonomi rumah tangga, apabila konsumsi produk luar terlalu besar, maka harus ditutup dengan menjual aset atau minimal menyewakan aset asetnya dan itulah yang terjadi kenapa sumber alam kita sewakan kepada modal asing.

B. Ekonomi Konvensional Juga Pro Rakyat

Sebenarnya kebijakan ekonomi konvensional yang biasa ditempuh sebenarnya juga sudah pro rakyat. Kebijakan tersebut adalah kebijakan ekonomi makro seperti,

1. Mengendalikan kenaikan harga harga (inflasi), karena inflasi sangat memukul rumah tangga bawah (manifestasi rakyat).

2. Mega proyek infra struktur baik jalan jalan penembus daerah terisolir, jakur kereta api, bendungan bendungan, listrik, dan jalur maya internet, semuanya memudahkan rakyat. Secara tidak langsung akan menekan harga yang murah.

Perlu dicatat bahwa infra struktur yang makin besar memerlukan anggaran perawatan yang besar. Pada titik tertentu anggaran yang tersedia hanya habis untuk perawatan (infrastruktur trap). Infra struktur menjadi tidak efisien apabila pengguna tidak banyak. Pembangunan infra struktur di Timur memerlukan jumlah penduduk yang cukup. Di samping perlunya migrasi ke Timur juga perlu membawa daya beli ke Timur. Sangat baik bila beberapa departemen dipindahkan ke Papua dan sekitarnya, pertama membawa daya beli, kedua masalah isue pelepasan diri.

3. Memperbanyak investasi baik domestk maupun asing, dengan serangkaian deregulasi terutama penyederhanaan peraturan yang mendorong bisnis.

Investasi baik domestik maupun asing akan meningkatkan kapasitas produksi (pertumbuhan ekonomi) memberi pekerjaan kepada rakyat banyak dan pekerjaan ikutannya yang hal itu ditunggu oleh jutaan lulusan baru, jutaan penganggur, dan setengah penganggur. Investasi dalam pengertian seperti di atas juga pro rakyat.

4. Mendorong suku bunga rendah juga merupakan kebijakan pro rakyat, karena dengan suku bunga rendah (single digit), rakyat diharap akan berani membuka bisnis bisnis baru, menolong dirinya sendiri dan pengangguran di sekitarnya. Dengan demikian kebijakan konvensional ekonomi makro seperti contoh menjaga suku bunga rendah merupakan kebijakan pro rakyat.

5. Mungkin kita bertanya, kenapa ada segelintir orang Indonesia sangat kaya dan masuk dalam daftar orang kaya dunia, dan menyebabkan ketimpangan? Dalam pengertian yang luas, adanya orang kayapun juga pro rakyat, terutama yang mengelola usahanya dengan modern berbasis tes yang memberi kesempatan rakyat untuk menjadi pekerja dan bahkan ekskutif eksekutif di dunia bisnis.

6. Memasukkan investor asing yang mungkin sering menjadi pertanyaan umum, juga pro rakyat, karena memberi pekerjaan dan umumnya dengan imbalan lebih baik. Aliran modal ini juga mengurangi gelembung ekonomi di negara maju, jika uang hanya menggenang di negara tersebut.

Kalau demikian halnya, apakah yang kita maksud dengan pro rakyat ? Apakah itu spesifik, memiliki corak kebijakan yang berbeda? Apblicable untuk diterapkan oleh pemerintah sebagai kebijakan?

C. Mencari Kebijakan Ekonomi yang Lebih Sepesifik Pro Rakyat.

1. Semua progran welfare state, santunan pendidikan, kesehatan, pensiun untuk seluruh rakyat, dan bantuan pangan bagi si miskin, kecuali program pensiun untuk semua warga negara yang sampai sekarang masih berproses, semua program ini sudah ada dan jauh lebih baik dari waktu lalu. Sistem BOS dan larangan memungut tambahan uang sekolah dan BPJS kesehatan sanagt membantu rakyat. Kita sudah semakin dekat dengan ekonomi pro rakyat.

2. Kebijakan Bunga Rendah dengan Subsidi Bunga

Suku bunga murah sangat pro rakyat, agama Islam juga menghendaki suku bunga (riel) nol yaitu hanya sebesar inflasi saja. Hampir semua ajaran Islam pro rakyat, memberi hak ekonomi wanita (asbabul nuzulnya merupakan fihak yang lemah), membebaskan budak, yatim miskin. Merupakan tema mayoritas di dalam Al Qur an dan Fikih.

Masalahnya adalah Bank Indonesia dan OJK dan perbankan terkait dengan relasi global. Di mana negara Indonesia dengan inflasi sekitar 5 persen harus memberi insentif bunga yang menarik supaya modal tidak berlari ke luar negeri.

Namun demikian pemerintah melalui subsidi bunganya (misalnya KUR) perlu diperkuat dengan magnitute yang lebih besar. Jadi skenario yang bisa diambil, biarkan OJK dan Bank Indonesia mengikuti pasar, tetapi pemerintah membuat terobosan dengan subsidi bunga. Tindakan ini merupakan prototype ekonomi pro rakyat. Karena yang ditanggung negara hanya sebagaian bunga, dan mestinya pinjaman pokok tetap dari Bank maka setiap 1 rupiah subsidi bisa memantik 20 kali pinjaman. Tema KUR atau subsidi bunga hendaknya menjadi

Rakyat bagaimanapun hendaknya kelompok menengah (misalnya para sarjana) untuk mendapat kesempatan mendirikan usaha baru dan memperoleh suku bungan .

3. Sistem Kupon Untuk Mengarahkan Semua Subsidi

Defisit neraca pembayaran yang selama beberapa tahun terjadi bersumber dari konsumsi BBM bersubsidi yang besar. Defisit ini berkurang ketika harga BBM turun. Akan tetapi dengan meningkatnya kembali harga minyak, diduga defisit akan membesar kembali.

Sistem kupon sebagai pembatas subsidi dan mengarahkan kupon kepada kelompok bawah atau rakyat, mestinya bisa diberlakukan. Dengan kemajuan IT sekarang tidak sulit membuat kupon subsidi supaya tepat sasaran. Dengan demikian subsidi bisa dirancang dengan baik dalam APBN, dan kelompok kaya dipersilakan membeli BBM pada harga pasar.

Sistem kupon untuk subsidi pupuk juga perlu diberlakukan karena, karena subsidi pupuk kita dinikmati pengusaha perkebunan yang kaya. Mempertahankan harga pangan yang murah dengan subsidi sangat baik dengan sistem buffer stock apa yang kita kenal dengan BULOG. Karena struktur masyarakat kita buruh, baik buruh tani maupun buruh industri.

Subsidi memang diperlukan akan tetapi subsisdi menjadi beban APBN, oleh sebab itu anak anak muda yang ahli IT diharapkan bisa merancang sistem subsidi tepat sasaran dengan kartu atau kupon. Dengan demikian subsidi hanya terbatas dari dana APBN yang direncanakan dan benar benar tepat sasaran pro rakyat bawah.

4. Alokasi Dana Negara Ke Desa dan Daerah

Alokasi dana negara ke desa dan daerah akan menggerakkan ekonomi rakyat. Dana itu hatus dijaga supaya tidak kembali ke kota dan ke Jakarta. Artinya dana harus dibelikan kepada produk produk pedesaan. Misalnya bandingkan untuk mengaspal atau paving jalan desa. Yang pertama dana akan kembali ke kota, untuk yang kedua dana akan lebih berputar di pedesaan.

Bank bank desa bunga rendah dapat memantik kreatifitas bisnis pedesaan. Mestinya juga perlu dihibahkan badah hukum lembaga keuangan pedesaan untuk menggerakkan ekonomi rakyat jauh di pelosok pedesaan.

5. Upah Minimum

Buruh merupakan manifestasi rakyat bawah. Upah buruh sangat dilematis, di satu sisi diperlukan untuk memperbaiki ekonomi keluarga bawah, di sisi lain mengurangi minat berusaha, mengurangi permintaan tenaga kerja, dan mengurangi daya saing.

Perlu dirumuskan upah yang tepat, di mana investasi tidak terganggu, penyerapan tenaga kerja juga tetap berlanjut, tetapi daya beli rakyat juga meningkat. Upah bagaimanapun akan dibelanjkan kembali sebagai daya beli produk industri dan akan kendorong perkembangan berbagai industri.

Perlu di catat bahwa buruh yang berada pada sektor formal yang tercover oleh upah minimum tidak lebih dari 20 persen. Selebihnya merupakan pekerja informal dan sektor pertanian yang memperoleh upah lebih rendah.

D. Siapakah Rakyat Itu: Untuk Menolong Rakyat Tolonglah Klas Menemgah.

Kebijakan ekonomi pro rakyat haru menjawah definisi siapakah rakyat di situ ? Apakah para elit politik dan pengusaha kaya bukan rakyat? Yang di maksud rakyat dapat dikaitkan dengan mengurangi kesenjangan, tidak lain adalah lapiaan 40 persen terbawah. Ukuran 40 persen ini sudah diterima misalnya untuk mengukur kesenjangan berapa kue nasional yang dapat dinikmati kelompok 40 persen terbawah.

Bagaimana caranya menolong 40 persen terbawah? Apakah harus langsung membawa program ekonomi misalnya KUR ke sana? Tentu tidak, karena 40 persen terbawah ini memilili pendidikan rendah. Siapa yang harus ditolong? Justru 20 persen menengah dan 20 menengah atas. Mereka ini adalah sarjana sarjana baru yang menganggur.

Mereka inilah yang diharapkan menggerakkan ekonomi dengan merekrut 40 persen terbawah. Singkat kata 40 persen terbawah adalah sumber tenaga kerja murah, 20 persenda perseb menengaj dana menengah atasnya adalah kelompok dinamis.

Suplai Side, Reformasi Kurikulum dan Riset Perguruan Tinggi

Tugas memperbanyak pengusaha untuk menyerap lulusan baru sekutar 2,5 juta per tahun ditamvah stock pengangguran tahun lalu lebih dari 7 juta, maka ekonomi harus berlomba tumbuh mengembangkan usaha usaha baru.

Di anatar 2,5 juta lulusan baru 250 ribu harus menjadi wira usaha yang bertugas menyerap dan memberi pekerjaan sisanya. Para sarjana pantas mengemban misi ini mengembangkan unit unut bisnis dengan teknologi yang maju. Internet merupakan terobosan pemasaran yang sangat penting.

Kalau demikian kurikulum harus diubah, sampai dengan sekolah menengah didik anak anak siap kerja. Dan perguruan tinggi didik siap berusaha. Riset harus diarahkan kepada membantu UMKM. Sudah waktunya pendidikan tinggi berbuat lebih riel. Dosen dosen perlu duduk di industri, tahun pertama belajar dan tahun berikutnya memperbaiki. Pengajaran juga perlu lebih riel dengan contoh kasus industri nyata. Bawa masalah industri kedalam kelas.

Kurikulum kewira usahaan yang berisi motivasi bisnis dan memulikan bisnis yang jujur dan bertanggung jawab perlu diberikan. Teologi tentang mulianya bisnis karena perannya dala mengentaskan kelompok fakir (penganggur) perlu diberikan. Sekaligus memperbaiki bisnis yang tidak bertanggung jawab, misalnya korupsi bestek, menggunakan zat berbahaya, dan tidak menggunakan standar standar mutu, mengecewakan konsumen adalah tindakan tidak bermoral. Teologi dan pelajaran akhlak harus sampai di sana.

Penutup

Catatan tentang konvensi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah representasi rakyat yang maju atau cerdas. Mereka berada di depan tetapi merasakan denyut nadi kehidupan dan kesulitan rakyat. Konvensi seperti ini ada baiknya mengidentifikasi masalah masalah yang dihadapi oleh rakyat. Muhammadiyah adalah penyambung lidah rakyat. Pemikiran seperti di atas, merupakan lintas disiplin ekonomi makro dan mikro, yang mengutamakan tujuan untuk memudahkan rakyat.

Semoga bermanfaat.

Jogja 24 Mei 2016

Prof Bambang Setiaji